

Bertempat di Aula I Kantor Pemerintahan Kota Singkawang, Selasa malam (29/04) Permasis mendampingi Dirjen Administrasi dan Kependudukan Depdagri Dr.HA.Rasyid Saleh M.Si dan Direktur Tata Negara Depkum dan HAM Dr.Aidir Amin memberikan sosialisasi inventarisasi pemukim keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dr.HA.Rasyid Saleh M.Si memulai sosialisasinya dengan mengatakan bahwa di seluruh negeri ini masih banyak terdapat pemukim asing keturunan yang tidak jelas status kewarganegaraan dan status kependudukannya. Para pemukim ini disebut sebagai warganegara asing, karena mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian yang membuktikan bahwa mereka adalah warganegara Indonesia.Namun di sisi lain, mereka sudah lama dan bahkan secara turun temurun tinggal di wilayah Indonesia.Seharusnya mereka dapat memiliki dokumen kependudukan karena ketidakjelasan status kewarganegaraan. Untuk itu, pria kelahiran Makasar ini menambahkan,“Depdagri dan Depkum dan HAM telah menjalin kerjasama guna memperjelas status kewarganegaraan dan status kependudukan pemukim asing keturunan.”

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tata Negara Depkum dan HAM Dr.Aidir Amin mengatakan bahwa pemukim keturunan asing tidak perlu lagi menunggu penetapan pengadilan untuk melengkapi dokumen kewarganegaraan dan status kependudukannya.

“Warga keturunan asing yang sudah lama bermukim bahkan sudah beberapa generasi otomatis sudah WNI.Hanya perlu penegasan saja.Nah, untuk penegasan tersebut, Depkum dan HAM hanya memerlukan surat permohonan yang disampaikan oleh walikota berikut data orang-orang yang berhak mendapatkan status WNI.

Kalau data dan permohonan sudah disampaikan, kita akan langsung memberikan petikan keputusan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesianya. Dengan petikan keputusan tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan penerbitan KTP, KK dan Akte Kelahiran,"demikian Aidir Amin menambahkan.

Membuka sosialisasi ini, Walikota Singkawang, Hasan Karman, S.H., M.M., di hadapan ratusan hadirin yang terdiri dari seluruh Camat, lurah-lurah Pemkot Singkawang, perwakilan ormas-ormas, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adapt mengatakan bahwa masih terdapat banyak warga keturunan asing yang belum terdaftar di Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang dan mereka juga tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan kependudukan.

Menurut ayah 3 puteri ini, hal ini terjadi di samping karena kurangnya pengetahuan masyarakat juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan dan kecamatan. Kendala lain adalah mereka merupakan warga miskin sehingga tidak memiliki biaya untuk mengurus yang memerlukan biaya yang tidak murah. Belum lagi ditambah dengan komunikasi bahasa, sehingga tatkala didatangi petugas untuk didata, mereka malah menghindar karena takut mau ditangkap atau dirazia.

Karena itu, dengan adanya kemudahan dari pemerintah pusat sebagai pengejawantahan UU No.12 tahun 2006 dan UU No.23 tahun 2006, Hasan Karman menginstruksikan kepada Kepala Dinsosdukcapil, Camat dan Lurah di Singkawang untuk segera mensosialisasikan dan mendata warga keturunan asing yang belum punya dokumen kewarganegaraan dan kependudukan di kota Singkawang.

Selain Dirjen Adminduk Depdagri dan Direktur Tata Negara depkum dan HAM, tim sosialisasi juga terdapat Pimpinan Pusat IKI Osbert Lyman, Sekretaris IKI M.Indradi Kusumah, dan beberapa pengurus IKI seperti F.X.Suwardi dan Eddy Setiawan.

Sebelum mengadakan sosialisasi di Kota Singkawang, tim yang sama terlebih dahulu mengadakan hal yang sama di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Sebagai realisasi dari sosialisasi ini, Permasis bekerjasama dengan (IKI) Institut Kewarganegaraan Indonesia akan membantu pemerintah mengadakan pendataan seperti yang dimaksud dalam sosialisasi ini.(ns).

